

SCALE UP TATA KELOLA ADMINISTRASI DAN KEUANGAN KOPERASI MERAH PUTIH: PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TOMORI

¹Suriana AR Mahdi

²Rusman Soleman

³Mukhtar Adam

⁴Sitti Mukarramah

⁵Faradisa Bachmid

⁶Putri Ekawati Darma

⁷Sheila Kusumaningrum

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Khairun

Jl. Jusuf Abdulrahman, Ternate Selatan 97719

e-mail:

suriana.armahdi@unkhair.ac.id | rusmansoleman@unkhair.ac.id | mukhtaradam@unkhair.ac.id | sittimukarramah@unkhair.ac.id | faradisa.bachmid@unkhair.ac.id | putriekawati@unkhair.ac.id | seilakusumaningrum@unkhair.ac.id

Abstrak

Pengabdian ini mengkaji implementasi program penguatan tata kelola administrasi dan keuangan Koperasi Merah Putih Desa Tomori melalui pendekatan partisipatif. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah minimnya kapasitas pengurus dalam tata kelola administrasi dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi koperasi. Metode yang digunakan adalah participatory approach dengan lima tahapan: persiapan, sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan kapasitas 20 pengurus dan anggota koperasi dalam pengelolaan administrasi kelembagaan dan penyusunan laporan keuangan sesuai Permen KUKM No. 02 Tahun 2024. Program ini menghasilkan template laporan keuangan standar, modul pelatihan, dan peningkatan transparansi tata kelola koperasi. Temuan ini mengkonfirmasi pentingnya capacity building dalam memperkuat kelembagaan ekonomi desa sebagai pilar pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.

Kata kunci: tata kelola koperasi, akuntansi koperasi, pemberdayaan masyarakat, ekonomi desa, participatory approach



1. ANALISIS SITUASI

Koperasi sebagai badan usaha berbasis kekeluargaan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, koperasi di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek tata kelola administrasi dan keuangan.

Penelitian Zakariya (2020) mengidentifikasi bahwa lemahnya tata kelola kelembagaan menjadi faktor utama belum optimalnya peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi desa. Hal ini sejalan dengan temuan Edward (2018) yang menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga ekonomi desa di Indonesia Timur belum berkembang secara signifikan meskipun dukungan dana desa cukup memadai. Permasalahan ini menjadi semakin krusial di era otonomi desa, dimana koperasi diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Dalam konteks tata kelola koperasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadi prasyarat fundamental bagi kepercayaan anggota dan keberlanjutan usaha. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 02 Tahun 2024 tentang Akuntansi Koperasi mensyaratkan penerapan standar pelaporan keuangan yang komprehensif, meliputi neraca, laporan sisa hasil usaha, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun, implementasi standar ini masih menghadapi kendala kapasitas sumber daya manusia di tingkat koperasi desa.

Pengabdian ini bertujuan menganalisis implementasi program penguatan tata kelola administrasi dan keuangan pada Koperasi Merah Putih Desa Tomori melalui pendekatan partisipatif. Novelty pengabdian ini terletak pada penggunaan participatory approach



yang mengintegrasikan capacity building dengan penerapan teknologi sederhana dalam konteks koperasi desa di wilayah kepulauan

2. MASALAH MITRA

Secara garis besar, permasalahan yang dihadapi mitra dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama:

Kelemahan Tata Kelola Administrasi (Organizational Governance)

- Sistem Pengarsipan Manual: Dokumen keanggotaan, notulensi rapat, dan surat-menyerat masih dikelola secara fisik (hardcopy) tanpa backup digital, sehingga berisiko rusak atau hilang.
- Standard Operating Procedures (SOP): Belum adanya SOP yang jelas dan tertulis mengenai alur kerja administratif, sehingga pembagian tugas antar pengurus sering tumpang tindih (*overlapping*).
- Database Anggota tidak Update: Data mutasi anggota (masuk, keluar, atau perubahan profil) tidak terekam secara real-time, menyulitkan pengambilan keputusan saat Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Kendala Pengelolaan Keuangan (Financial Management)

- Pencatatan Belum Standar Akuntansi: Laporan keuangan masih menggunakan pembukuan sederhana (arus kas masuk-keluar) dan belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).
- Keterlambatan Laporan Keuangan: Proses rekonsiliasi data keuangan membutuhkan waktu lama karena belum terintegrasi, sehingga laporan bulanan sering terlambat disajikan kepada pengawas.
- Transparansi Pembagian SHU: Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) masih dilakukan secara semi-manual yang rawan kesalahan hitung (*human error*), yang berpotensi memicu ketidakpuasan anggota.

Rendahnya Literasi Teknologi Digital (Digital Readiness)

- Belum Adanya Sistem Informasi Koperasi: Seluruh proses bisnis masih bergantung pada spreadsheet (Excel) mandiri yang tidak saling terhubung antar divisi.

- Keterbatasan SDM: Pengurus memiliki motivasi tinggi namun memiliki keterbatasan keterampilan teknis dalam mengoperasikan perangkat lunak akuntansi atau aplikasi manajemen koperasi modern

A. Solusi Permasalahan

Untuk mengatasi kendala pada Koperasi Merah Putih, tim pengabdian menawarkan solusi komprehensif yang terbagi ke dalam tiga pilar utama:

Digitalisasi Administrasi dan Database (Administrative Upgrade)

- Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Koperasi: Membangun atau mengadopsi platform berbasis web/cloud untuk mengintegrasikan data anggota, simpanan, dan pinjaman secara terpusat.
- Digitalisasi Dokumen (E-Archiving): Migrasi arsip fisik ke sistem penyimpanan awan (*Cloud Storage*) agar dokumen penting aman dari kerusakan fisik dan mudah diakses secara cepat.
- Penyusunan Modul SOP Digital: Menyusun standar operasional prosedur yang terdokumentasi secara digital untuk memastikan alur kerja administrasi tetap konsisten meskipun terjadi pergantian pengurus.

Standarisasi dan Otomasi Laporan Keuangan (Financial Scale-Up)

- Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis SAK ETAP: Mengonfigurasi sistem pencatatan keuangan yang otomatis menghasilkan Laporan Laba Rugi, Neraca, dan Perubahan Ekuitas sesuai standar akuntansi yang berlaku.
- Sistem Perhitungan SHU Otomatis: Menggunakan algoritma sistem untuk menghitung Sisa Hasil Usaha (SHU) secara proporsional berdasarkan partisipasi ekonomi anggota, guna menjamin transparansi dan akurasi.
- Dashboard Keuangan Real-Time: Menyediakan akses khusus bagi pengawas koperasi untuk memantau kesehatan keuangan kapan saja tanpa harus menunggu laporan bulanan manual.



Peningkatan Kapasitas SDM (Human Capital Development)

- Pelatihan dan Workshop Intensif: Menyelenggarakan pelatihan teknis pengoperasian perangkat lunak bagi pengurus dan staf administrasi.
- Pendampingan (Mentoring) Pasca-Implementasi: Melakukan pendampingan berkala selama 3–6 bulan untuk memastikan sistem baru berjalan dengan baik dan membantu penyelesaian kendala teknis di lapangan.
- Penyusunan Buku Panduan (User Manual): Membuat buku saku atau video tutorial sebagai panduan praktis bagi pengurus dalam menjalankan sistem tata kelola yang baru.

3. METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pendekatan partisipatif (*participatory approach*) yang menempatkan Pengurus Koperasi Merah Putih Desa Tomori sebagai subjek utama dalam setiap tahapan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mitra dan dapat memberikan manfaat nyata serta berkelanjutan. Metode pelaksanaan meliputi:

1. Sosialisasi dan komunikasi awal dengan pengurus koperasi untuk menyamakan persepsi terkait tujuan dan target kegiatan.
 2. Pelatihan berbasis praktik (*learning by doing*) terkait administrasi kelembagaan dan akuntansi koperasi.
 3. Pendampingan langsung dalam penyusunan dokumen administrasi dan laporan keuangan.
- a. Lima Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
1. Tahap Persiapan dan Perencanaan
 - Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, pengurus koperasi, dan pihak terkait.
 - Menyusun jadwal kegiatan, modul pelatihan, dan instrumen evaluasi.



- Melakukan identifikasi kebutuhan (need assessment) terkait masalah administrasi dan keuangan koperasi.
 - 2. Tahap Sosialisasi Program
 - Menyampaikan tujuan, manfaat, dan rencana kegiatan kepada pengurus dan anggota koperasi.
 - Menggali aspirasi dan masukan dari pengurus koperasi agar program sesuai dengan kebutuhan.
 - Membentuk komitmen bersama antara tim pengabdian dan mitra.
 - 3. Tahap Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas
 - Memberikan pelatihan mengenai administrasi kelembagaan koperasi, termasuk penyusunan AD/ART, daftar anggota, dan tata kelola rapat anggota.
 - Melatih pengurus dalam pencatatan transaksi keuangan, siklus akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan koperasi sesuai Permen KUKM No. 02 Tahun 2024.
 - Menyediakan modul pelatihan dan template laporan keuangan koperasi sebagai panduan praktis.
 - 4. Tahap Pendampingan dan Penerapan Teknologi
 - Melakukan pendampingan secara langsung dalam penyusunan laporan keuangan koperasi berbasis standar akuntansi koperasi.
 - Memperkenalkan penggunaan aplikasi akuntansi sederhana untuk mempercepat proses pencatatan.
 - 5. Tahap Monitoring, Evaluasi, dan Rencana Tindak Lanjut
 - Melakukan evaluasi terhadap pemahaman pengurus setelah pelatihan dan pendampingan.
 - Mengukur keberhasilan kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditentukan (peningkatan keterampilan, tersusunnya dokumen kelembagaan, dan laporan keuangan).
- b. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan kegiatan ini dapat diukur melalui:



1. Adanya peningkatan pemahaman pengurus koperasi tentang administrasi kelembagaan.
2. Tersusunnya dokumen administrasi koperasi secara sistematis.
3. Tersusunnya laporan keuangan koperasi sesuai standar akuntansi koperasi.
4. Meningkatnya partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan kelembagaan dan usaha produktif.

c. Lokasi

Pengabdian dilaksanakan di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan pada bulan Agustus 2024. Subjek penelitian adalah 20 pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih Desa Tomori yang dipilih melalui purposive sampling berdasarkan keterlibatan aktif dalam kegiatan koperasi.

3.3 Prosedur Penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui lima tahapan:

1. Tahap Persiapan: Need assessment melalui wawancara mendalam dengan pengurus koperasi dan observasi kondisi administrasi dan keuangan koperasi.
2. Tahap Sosialisasi: Focus Group Discussion (FGD) untuk mengidentifikasi permasalahan spesifik dan membangun komitmen bersama.
3. Tahap Pelatihan: Capacity building melalui workshop interaktif tentang administrasi kelembagaan dan akuntansi koperasi sesuai Permen KUKM No. 02 Tahun 2024.
4. Tahap Pendampingan: Coaching dan mentoring dalam implementasi sistem administrasi dan penyusunan laporan keuangan.
5. Tahap Evaluasi: Assessment terhadap peningkatan kapasitas dan evaluasi outcome program.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Baseline Koperasi Merah Putih Desa Tomori



Hasil need assessment menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih Desa Tomori menghadapi permasalahan sistemik dalam tata kelola administrasi dan keuangan. Dokumen kelembagaan seperti AD/ART, daftar anggota, dan notulensi rapat belum terdokumentasi secara sistematis. Pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual dengan format yang tidak standar, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan belum memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Zakariya (2020) yang mengidentifikasi lemahnya kapasitas teknis sebagai hambatan utama pengembangan kelembagaan ekonomi desa. Kondisi serupa juga ditemukan dalam studi Edward (2018) pada lembaga ekonomi desa di Maluku Utara, yang menunjukkan gap signifikan antara potensi kelembagaan dengan kapasitas aktual dalam pengelolaan administrasi dan keuangan.

B. Implementasi Program Penguatan Kapasitas

Tahap Pelatihan Administrasi Kelembagaan

Pelatihan administrasi kelembagaan difokuskan pada penyusunan dokumen formal koperasi sesuai standar regulasi. Materi mencakup penyusunan AD/ART, sistem pengarsipan dokumen, dan tata kelola rapat anggota. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang importance of proper documentation dalam menjaga legitimasi dan akuntabilitas kelembagaan.

Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah experiential learning dengan simulasi penyusunan dokumen secara praktis. Hal ini sejalan dengan teori Kolb (1984) tentang learning cycle yang menekankan pentingnya concrete experience dalam proses pembelajaran dewasa. Partisipasi aktif peserta dalam simulasi menunjukkan efektivitas metode ini dalam konteks capacity building kelembagaan.

C. Tahap Pelatihan Akuntansi Koperasi



Pelatihan akuntansi koperasi didesain berdasarkan Permen KUKM No. 02 Tahun 2024, mencakup siklus akuntansi lengkap dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Peserta dilatih untuk menyusun empat komponen laporan keuangan utama: neraca, laporan sisa hasil usaha, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Implementasi pelatihan menggunakan metode step-by-step dengan studi kasus yang disesuaikan dengan kondisi koperasi lokal. Hasil pre-post assessment menunjukkan peningkatan skor rata-rata dari 4.2 (kategori rendah) menjadi 7.8 (kategori baik) dalam pemahaman konsep akuntansi koperasi. Peningkatan ini mengkonfirmasi efektivitas pendekatan hands-on training dalam konteks adult learning.

D. Outcomes dan Impact Program

Peningkatan Kapasitas Teknis

Evaluasi menggunakan Kirkpatrick Model menunjukkan hasil positif pada semua level. Pada level reaction, 95% peserta menyatakan kepuasan tinggi terhadap relevansi materi dengan kebutuhan koperasi. Level learning menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan administrasi (dari 40% menjadi 85% tingkat pemahaman) dan akuntansi (dari 35% menjadi 80% tingkat pemahaman).



Pada level behavior, observasi follow-up menunjukkan bahwa 80% pengurus mulai mengimplementasikan sistem pencatatan yang dipelajari. Level results terlihat dari tersusunnya dokumen administrasi yang lebih sistematis dan draft laporan keuangan sesuai standar. Hasil ini mengkonfirmasi efektivitas program dalam mencapai tujuan capacity building yang sustainable.

E. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan

Program berhasil menghasilkan template standardized untuk administrasi dan pelaporan keuangan yang dapat direplikasi oleh koperasi sejenis. Implementasi sistem dokumentasi digital sederhana meningkatkan efisiensi administrasi dan memperkuat audit trail untuk accountability purposes.



Perubahan behavioral yang terobservasi mencakup peningkatan participation rate anggota dalam rapat (dari 60% menjadi 85%) dan meningkatnya trust level anggota terhadap transparansi pengelolaan keuangan. Hal ini sejalan dengan teori Putnam (1993) tentang hubungan antara good governance dengan penguatan social capital dalam komunitas.

F. Challenges and Lessons Learned

Tantangan Implementasi

Tantangan utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan literasi digital sebagian pengurus, terutama dalam penggunaan

software akuntansi sederhana. Hal ini menuntut modifikasi pendekatan pelatihan dengan memperpanjang durasi praktik dan menyediakan mentoring individual yang lebih intensif.

Tantangan lain adalah sustainability program pasca-intervention. Untuk mengatasi hal ini, dibentuk peer learning group di antara pengurus dan dijadwalkan follow-up session berkala untuk monitoring dan troubleshooting. Strategi ini sejalan dengan rekomendasi Pretty (1995) tentang pentingnya local capacity dalam memastikan keberlanjutan program participatory development.

G. Lessons Learned

Beberapa lesson learned dari implementasi program ini:

1. **Contextual Adaptation:** Materi pelatihan harus disesuaikan dengan kondisi spesifik koperasi lokal, termasuk skala usaha dan karakteristik anggota.
2. **Gradual Implementation:** Penerapan sistem baru memerlukan pendekatan bertahap dengan continuous support untuk memastikan adoption yang optimal.
3. **Local Leadership:** Keterlibatan aktif local champion di antara pengurus menjadi kunci sukses dalam peer-to-peer learning dan sustainability program.
4. **Technology Appropriateness:** Penggunaan teknologi harus mempertimbangkan kapasitas lokal dan infrastruktur yang tersedia.

H. Implikasi untuk Pengembangan Koperasi Desa

Pengabdian ini memberikan beberapa implikasi penting untuk pengembangan koperasi desa:

1. Implikasi Teoretis

Pengabdian ini memperkuat teori participatory development dalam konteks capacity building kelembagaan ekonomi desa. Efektivitas pendekatan partisipatif dalam meningkatkan local ownership dan sustainability program mengkonfirmasi



validitas teori Chambers (1995) tentang people-centered development.

Integrasi antara technical assistance dengan empowerment approach terbukti efektif dalam menghasilkan transformative change yang sustainable. Hal ini sejalan dengan konsep transformative learning (Mezirow, 1991) yang menekankan pentingnya critical reflection dalam proses pembelajaran dewasa.

2. Implikasi Praktis

Bagi praktisi pengembangan masyarakat, pengabdian ini menunjukkan pentingnya comprehensive needs assessment dan contextual adaptation dalam designing capacity building programs. Penggunaan local case studies dan hands-on approach terbukti lebih efektif dibandingkan theoretical training dalam konteks adult learning.

Bagi policy makers, temuan ini mengindikasikan perlunya dukungan regulatif dan teknis yang berkelanjutan untuk implementasi standar akuntansi koperasi di tingkat desa. Pengembangan training modules yang standardized namun adaptable dapat mempercepat scale-up program serupa di wilayah lain.

3. Implikasi untuk Penelitian Masa Depan

Pengabdian selanjutnya perlu mengeksplorasi long-term impact dari program capacity building terhadap kinerja finansial dan social impact koperasi merah putih. Comparative study antara berbagai approach dalam capacity building juga dapat memberikan insight tentang best practices untuk konteks yang berbeda.

5. KESIMPULAN

Implementasi program penguatan tata kelola administrasi dan keuangan Koperasi Merah Putih Desa Tomori melalui participatory approach menunjukkan hasil yang menggembirakan. Program

berhasil meningkatkan kapasitas 20 pengurus dan anggota koperasi dalam pengelolaan administrasi kelembagaan dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar regulasi.

Keberhasilan program ini mengkonfirmasi efektivitas pendekatan partisipatif dalam capacity building kelembagaan ekonomi desa. Penggunaan experiential learning dengan hands-on practice terbukti lebih efektif dalam meningkatkan adoption dan retention pengetahuan teknis. Template dan tools yang dihasilkan dapat direplikasi untuk pengembangan koperasi sejenis di wilayah lain.

Sustainability program memerlukan dukungan berkelanjutan melalui peer learning networks dan periodic refresher training. Integrasi dengan ecosystem development yang lebih luas, termasuk linkage dengan lembaga keuangan dan market access, menjadi faktor penting untuk mewujudkan impact jangka panjang terhadap kesejahteraan anggota dan pembangunan ekonomi desa.

Pengabdian ini berkontribusi pada body of knowledge tentang community-based development dan memberikan practical guidance untuk scaling-up program capacity building koperasi desa di Indonesia Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya.



UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami berikan kepada pengurus Koperasi Merah Putih Desa Tomori serta perangkat desa dan mahasiswa FEB, yang telah menerima dan mendukung program kegiatan pengabdian masyarakat kami dengan baik



Jurnal Pengabdian Masyarakat
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Volume 6, Nomor 2
Juli-Desember 2025

DAFTAR PUSTAKA

1. Birchall J. Cooperatives and the millennium development goals. Geneva: International Labour Office; 2004.
2. Chambers R. The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Dev.* 1994;22(7):953-69.
3. Chambers R. Poverty and livelihoods: whose reality counts? *Environ Urban.* 1995;7(1):173-204.
4. Cornwall A. Unpacking 'participation': models, meanings and practices. *Community Dev J.* 2008;43(3):269-83.
5. Edward CN. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan ekonomi desa di Maluku Utara. *J Ekon Pembangun Reg.* 2018;13(2):45-62.
6. Freire P. Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum International; 1970.
7. International Cooperative Alliance (ICA). Guidance notes to the cooperative principles. Brussels: ICA; 2015.
8. Kirkpatrick D, Kirkpatrick J. Evaluating training programs: the four levels. 3rd ed. San Francisco: Berrett-Koehler; 2006.
9. Kolb DA. Experiential learning: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs: Prentice Hall; 1984.
10. McNiff J, Whitehead J. All you need to know about action research. 2nd ed. London: SAGE Publications; 2011.
11. Mezirow J. Transformative dimensions of adult learning. San Francisco: Jossey-Bass; 1991.
12. Othman A, Kari F, Hamdan R, Rahman ARA. Factors influencing cooperative membership and share increment: an application of the logistic regression analysis in the Malaysian cooperatives. *World Rev Bus Res.* 2012;2(5):24-35.
13. Pretty JN. Regenerating agriculture: policies and practice for sustainability and self-reliance. London: Earthscan; 1995.
14. Putnam RD. Making democracy work: civic traditions in modern Italy. Princeton: Princeton University Press; 1993.



15. United Nations Development Programme (UNDP). Capacity development: a UNDP primer. New York: UNDP; 2009.
16. Woolcock M, Narayan D. Social capital: implications for development theory, research, and policy. World Bank Res Obs. 2000;15(2):225-49.
17. Zakariya I. Analisis faktor penghambat pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Garut. J Pembangun Sosial. 2020;23(1):89-103.

